

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Siap Grak

Wilayah: Kabupaten Boyolali

## Target PAD Pemkab Boyolali 3 Sektor Meleset, Terdampak Pandemi Covid-19

<https://siapgrak.com/artikel/RBgkW23>

**BOYOLALI** – Pandemi Covid-19 berdampak pada pendapatan daerah. Ada tiga sektor yang tidak mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Boyolali tahun ini. Alasannya, pembatasan kegiatan dan pandemi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali, Purwanto mengatakan, target PAD beberapa sektor tidak tercapai, bahkan meleset cukup jauh. Yakni, pajak restoran, pajak hotel serta retribusi pariwisata. "Pendapatan dari pajak restoran dan hotel capainya sekitar 40 persen dari target. Sedangkan retribusi pariwisata ya kurang dari 50 persen. Karena memang pandemi membuat pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi mereka ini kan yang kasat mata terdampak," jelasnya, kemarin (9/12).

Purwanto tidak menyebut secara pasti nilai pendapatannya. Namun, ketiga sektor ini tidak mampu memenuhi target. Berbeda, di sektor lainnya seperti pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak terdampak pandemi. Keduanya berhasil memenuhi target yang ditentukan.

"Target PAD Boyolali tahun 2021 sekitar Rp 390 miliar. Saat ini capaian PAD mencapai 90 persen," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Boyolali, Supana menjelaskan, sektor pariwisata menjadi penyumbang PAD cukup besar. Namun, pasca gelombang kedua Covid-19 Juli lalu, kawasan objek wisata di Boyolali terpaksa tutup. Sektor pariwisata baru dibuka pada November lalu.

"Untuk pendapatan daerah PAD dari pengelolaan objek pariwisata sampai saat ini masih jauh dari harapan. Sampai saat ini baru 59 persen dari target Rp 1.075.000.000," ungkapnya.

Capaian PAD sektor wisata pada September lalu baru mencapai Rp 634.250.000. Itupun karena beberapa pengelola objek wisata membayar penuh di muka. Selain itu, ada juga pengelola objek wisata yang membayar uang muka dan selanjutnya dibayarkan bertahap. Serta beberapa memilih membayar di akhir.

"Kondisi pandemi memang berimbas besar pada sektor ini," tandasnya.  
(rgl/adi/dam)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH